

BANALITAS EMPOWERMENT PROGRAM, PERLUKAH REKONSTRUKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN?

Apik Anitasari Intan Saputri¹, Nita Triana², dan Laily Liddini³

¹STAI Al-Hikmah 2 Brebes

^{2,3}UIN Prof KH Saifuddin Zuhri

apik.saputri@gmail.com¹

ABSTRACT

The purpose of this writing is to explore and reveal government empowerment programs that are not on target. This paper is a non-doctrinal research with qualitative analysis. Gender inequality limits the role of women to access various resources. These limitations make women more vulnerable to poverty. Women's participation as a driver of the family economy is important to get support from the government. In accordance with the mandate of Permendagri Number 1 of 2013 concerning Community Empowerment through the Family Empowerment and Welfare Movement. The result of this study is that the Empowerment and Poverty Alleviation Program in the former Banyumas Resident area has been carried out, but the absorption of funds in the program is still not optimal. This paper is a non-doctrinal research with qualitative analysis. The result of this study is that the Empowerment and Poverty Alleviation Program in the former Banyumas Resident area has been carried out, but the absorption of funds in the program is still not optimal. One of the main factors is the lack of knowledge of the local apparatus in preparing the budget draft, lack of digging Asset Based Communities from the village so that women's empowerment programs experience banality, the target funds that should be used optimally are very slow, not on target. The findings of this study, with the empowerment of women through a productive economy through groups in villages more benefits for families, members can obtain and meet their living needs quickly with the management of funds in their community groups such as KUB (joint business group) Berkah Jaya and also the Inyong Garbage Bank, The government needs to reactualize the empowerment program to the community not only through the top down system but what is needed is bottom up so that the needs of local wisdom from each group in the village can be achieved properly.

Keyword: Empowerment, Women, Economy, Family

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk menggali dan menggungkapkan program pemberdayaan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Ketidaksetaraan gender membatasi peran perempuan untuk mengakses berbagai sumber daya. Keterbatasan ini menyebabkan perempuan menjadi

lebih rentan terhadap kemiskinan. Keikutsertaan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga penting mendapatkan dukungan dari pemerintah. Sesuai amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Tulisan ini merupakan penelitian non doktrinal dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Program pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan di wilayah eks Karesiden Banyumas telah dilakukan, namun serapan dana dalam program tersebut masih belum optimal. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan aparaturnya setempat dalam menyusun rancangan anggaran, kurang menggali *Asset Based Communities* dari desa tersebut sehingga program pemberdayaan perempuan mengalami banalitas, sasaran dana yang seharusnya dapat dipergunakan dengan maksimal realitasnya sangat lambat, tidak tepat sasaran. Hasil temuan Penelitian ini, dengan Adanya pemberdayaan perempuan melalui ekonomi produktif melalui kelompok di desa lebih dirasakan manfaatnya untuk keluarga, para anggota dapat memperoleh dan mencukupi kebutuhan hidup mereka secara cepat dengan adanya pengelolaan dana di kelompok komunitas mereka seperti KUB (kelompok Usaha bersama) Berkah Jaya dan juga Bank Sampah Inyong, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi dalam program pemberdayaan kepada masyarakat tidak hanya melalui sistem *top down* namun hal yg dibutuhkan adalah *bottom up* sehingga kebutuhan *local wisdom* (kearifan lokal) dari masing masing kelompok di desa dapat tercapai dengan baik.

Keyword: *Pemberdayaan, Perempuan, Ekonomi, Keluarga*

PENDAHULUAN

Perempuan di masa sekarang tidak sedikit yang terlibat aktif dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Namun tidak sedikit pula perempuan yang tidak berkesempatan untuk ikut berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga.¹ Ketidaksetaraan gender membatasi peran perempuan untuk mengakses berbagai sumber daya. Keterbatasan ini menyebabkan perempuan menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan; fenomena ini biasa disebut kemiskinan perempuan. Disparitas² akses ekonomi antara perempuan dan laki-laki juga disebabkan oleh pembagian peran gender dalam rumah tangga yang lebih berbahaya bagi perempuan. Selain itu perempuan juga memiliki keterbatasan dalam hal Pendidikan, ketrampilan, kesempatan kerja yang lebih sedikit dan pengkotakan peran perempuan dalam keluarga, ini lebih banyak terjadi pada perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Perempuan juga dihadapkan dengan “*triple burden of*

¹ Wahyu Tjiptaningsih, Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan Di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon), Reformasi : Jurnal Ilmiah Administrasi, Vol 1, No 2 (2017): 28-35.

² Disparitas/Dis·Pa·Ri·Tas/ N Perbedaan; Jarak: Ada -- Upah Yang Diterima Oleh Para Pekerja. <https://Kbbi.Web.Id/Disparitas>,

women”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat.

Masalah ketimpangan gender perlu adanya pemahaman yang berbeda mengenai posisi dan peran perempuan didalam keluarga maupun masyarakat. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dapat menjadi salah satu upaya membongkar masalah tersebut. Indikator meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga dilihat pada keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan. Perempuan harus diberikan akses terhadap informasi dan kebebasan berpendapat mengenai haknya dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik dilingkungan mereka. Peran pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi tersebut. Pemberdayaan yang dimaksud dapat dimulai dengan kesetaraan posisi perempuan dalam keluarga dimulai dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, keterbukaan akses memperoleh sumber daya produktif sampai keaktifan pada aspek publik seperti perkumpulan.

Di Indonesia, fenomena perempuan ikut memenuhi ekonomi keluarga semakin umum terjadi terutama di kota-kota besar. Dimana biaya hidup lebih besar dan kesadaran akan kelemahan kemandirian finansial semakin tinggi. Wanita Indonesia juga semakin banyak yang memperoleh pendidikan tinggi sekaligus *skill* yang sangat mendukung bagi wanita untuk bisa berkecimpung di dunia kerja. Saat ini, jika kita meneliti lebih jelas dalam dunia kerja kiprah perempuan sudah sangat mendominasi dibandingkan kiprah seorang pria, yang dahulu urusan pemenuhan ekonomi adalah persoalan mutlak bagi suami (pria). Namun sekarang pemenuhan ekonomi ini sudah bergeser bahkan diambil alih oleh perempuan, atau hanya sedikit berbagi peran sesuai dengan perjanjian antara mereka yang didasari atas alasan tertentu. Entah itu karena alasan ketidakmampuan suami (sakit/meninggal), suami yang mengabaikan tugas utamanya, atau karena alasan kompleksitas kehidupan yang semakin meningkat. Maka saat ini sudah menjadi hal umum di sebagian besar masyarakat.³

³ Sri Fadilah, “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung,” *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* 1, No. 1 (2018): Hlm 22.

Namun perempuan yang ikut berperan dalam pemenuhan ekonomi tetaplah peran itu selalu dianggap sebagai peran pelengkap, walaupun dari segi pendapatan dan popularitas lebih unggul. Fenomena ini tak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi seringkali terjadi di banyak daerah, contoh fenomena yang sering dijumpai adalah perempuan yang sedang mencari nafkah di pasar tradisional. Selain itu contoh fenomena yang terjadi di salah satu desa, di Sumatera Utara. Di desa tersebut sebagian besar masyarakatnya menjadikan istri sebagai penopang perekonomian keluarga. Memang hal demikian didasari oleh pemikiran masyarakat yang memandang lumrah terhadap istri yang bekerja. Karena mereka menganggap diantara pria dan wanita mempunyai kesempatan yang setara. Selain itu dikarenakan faktor penghasilan perkapita di desa tersebut sangatlah rendah dan faktor pendidikan istri yang lebih unggul dibandingkan suami ⁴

Sejalan dengan perkembangan masa sekarang dan kemajuan pendidikan yang semakin maju, peranan perempuan masa sekarang yang telah menjadi istri pun tidak lagi hanya menjadi ibu rumah tangga yang melayani suami, mengupayakan pekerjaan domestik, melahirkan dan membesarkan anak, melainkan masa sekarang perempuan telah masuk dalam ranah publik yang berdampak pada banyaknya perubahan dalam sistem nilai dimasyarakat maupun keluarga. Kondisi inilah yang menjadi awal munculnya perempuan pencari nafkah, sebagai penggerak ekonomi keluarga. Apalagi pada zaman modern ini, kesempatan bagi perempuan untuk berkarir sangatlah terbuka luas, menduduki posisi yang sederajat dengan laki-laki, baik menjadi pekerja maupun menjadi seorang pemimpin.⁵

Hal ini juga telah terjadi di eks kabupaten Banyumas, perempuan telah memiliki kesempatan yang sama dalam urusan publik. Hal ini terbukti dengan banyaknya UMKM dan banyaknya program pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya untuk para perempuan di Banyumas. Perempuan yang ikut berperan dalam

⁴ Ulfa Ramadhani Nasution And Syarif Husein Pohan, "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, No. 1 (2021): Hlm. 58.

⁵ Ifti Ida, "Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja," *Harmoni* 18, No. 1 (2019): 519–31, Doi:10.32488/Harmoni.V18i1.340.

pemenuhan ekonomi keluarga memberikan dampak positif pada masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, serta memberikan contoh positif bagi wanita Indonesia bahwa mereka dapat mengembangkan potensi diri dan mencapai kesuksesan di bidang pekerjaan. Namun keikutsertaan perempuan dalam penggerak ekonomi keluarga membutuhkan peran pemerintah sehingga keterbukaan dan kesempatan perempuan bisa sama dengan laki-laki dimanapun berada. Tidak terkecuali peran pemerintah Terhadap Pemberdayaan Perempuan Sebagai Penggerak Ekonomi Keluarga Di Eks Karesidenan Banyumas.

Mengapa perlu Rekonstruksi? Ada lima hal yang sejauh ini terjadi dalam pemberdayaan itu sendiri, yaitu Stagnasi Program Pengentasan Kemiskinan, pemberdayaan sudah dianggap gagal, Pemberdayaan dituduh telah mengalami banalitas, dan yang terakhir ia terus dipolitisasi. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Perempuan di ex Karesidenan Banyumas sudah berjalan namun serapan program tidak optimal, dengan gerakan ekonomi produktif menjadikan penggerak ekonomi keluarga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah tepat sasaran, dimana pemberdayaan masyarakatnya harus berbasis *community based resource management* (pengelolaan sumberdaya lokal). Pengelolaan sumberdaya lokal ini harus menjawab tantangan pembangunan yaitu kemiskinan, lingkungan hidup yang memburuk dan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan lingkungannya. Pengelolaan sumberdaya ini juga harus berbasis *people centered development* (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi *social learning* (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (empowerment).⁶

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan

⁶ Lasiman Sugiri, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal - Universitas Bandar Lampung (UBL), vol 3 no 1(2012): 56-65.

penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai komitmen dari upaya pencapaian target menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir tahun 2024. Untuk mewujudkannya, selain melalui program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi, program pemberdayaan pun dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Program pemberdayaan ini penting untuk memperluas dampak dari program bantuan sosial yang menasar rumah tangga miskin ekstrem agar cepat keluar dari kemiskinan ekstrem serta memastikan keberlanjutan agar tetap berada di atas garis kemiskinan. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus tepat sasaran dan berkelanjutan.⁷

Turut andilnya pemerintah dalam pemberdayaan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga sangat dibutuhkan kehadirannya. Sesuai amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan PKK atau Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. PKK memiliki tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Awal berdirinya PKK diharapkan bisa mendorong perempuan dalam memainkan peran gandanya secara baik. Dimana perempuan sebagai pengelola keuangan dan sebagai pelaku pembangunan. Namun dalam perkembangannya, pemberdayaan perempuan berkembang juga dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan perempuan dalam PKK juga mengupayakan agar perempuan dapat meningkatkan kemampuan peran dari pada perempuan itu sendiri, mampu membebaskan perempuan dari budaya patriarki.

⁷ Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan, Kunci Keberhasilan Suatu Program Pemberdayaan', 2021
<https://setneg.go.id/baca/index/tepat_sasaran_dan_berkelanjutan_kunci_keberhasilan_suatu_program_pemberdayaan>. Diakses 10 Oktober 2023

Meskipun dalam prakteknya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender.⁸ Agensi perempuan dan aksi kolektif sama pentingnya dengan kemajuan ekonomi. Bukan hanya dimensi obyektif pemberdayaan ekonomi yang penting, seperti produktivitas atau pendapatan. Agensi (kapasitas untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan) sangat penting dan tidak selalu mengikuti dari peningkatan pendapatan atau aset saja. Sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kemandirian untuk mengambil risiko ekonomi, menentukan masa depan ekonomi mereka, dan memiliki daya tawar yang cukup dalam rumah tangga. Aksi kolektif, kekuatan perempuan yang bersatu dalam solidaritas untuk menjalankan suara kolektif mereka, adalah alat yang ampuh untuk transformasi sosial dan pendorong fundamental hak-hak ekonomi perempuan.⁹

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian non doktrinal dengan analisis kualitatif. Pendekatan Penelitian ini menggunakan *Asset Based Communities-driven Development* (ABCD). ABCD merupakan pendekatan yang ingin melakukan pemberdayaan komunitas dengan bertolak dari aset dan kekuatan dari komunitas. Ini bertolak belakang dari pendekatan tradisional yang ada selama ini yang lebih menfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas. Menurut Kretzmann dan McKnight jika memetakan masalah hanya fokus pada kelompok miskin, konsekuensi akan terjadi deviasi dari tujuan semula dari pemberdayaan menjadi ketergantungan. Disamping itu mereka menjadi kurang percaya diri, merasa berbeda dan merasa tidak mampu untuk membiayai atau menanggung hidupnya sendiri.¹⁰ Data Primer yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 4 sampel kelompok dari masing masing kabupaten

⁸ Nikma Wahyuni Hanis, Atika Marzaman, *Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Telaga*, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8, No 2,(2019): 123-135.

⁹ Sarah Hendriks, 'The Role of Financial Inclusion in Driving Women's Economic Empowerment', *Development in Practice*, 29.8 (2019), 1029–38 <<https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1660308>>. The role of financial inclusion in driving women's economic empowerment,2020..

¹⁰ Aissetu Barry Ibrahima, 'Asset Based Community Development (ABCD)', *Transforming Society*, 2018, 229–40 <<https://doi.org/10.4324/9781315205755-17>>.

di eks karesidenan Banyumas yaitu Kabupaten Banyumas Bank Sampah Inyong, Kabupaten Purbalingga KUB Berkah jaya, Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.¹¹ Metode Pemilihan sample dengan menggunakan *light interview* dalam *Focus Group Discussion* untuk menentukan informan kunci untuk selanjutnya dilaksanakan *indept interview*.

PEMBAHASAN

Stagnasi Program Pengentasan Kemiskinan, *Spotlight* dalam pemberdayaan

Setiap negara di dunia telah menghadapi kemiskinan dalam berbagai tingkatan. Pemberantasan kemiskinan adalah tujuan pembangunan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah kemiskinan telah menarik lebih banyak perhatian dari seluruh dunia. Dapatkah teknologi dan operasionalnya memungkinkan dunia untuk mencapai berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa? Saya memberikan perspektif saya sendiri tentang pertanyaan ini dengan berfokus pada masalah kesetaraan gender melalui lensa "pemberdayaan ekonomi perempuan." Ketidaksetaraan gender membatasi peran perempuan untuk mengakses berbagai sumber daya.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Angka kemiskinan nasional Indonesia masih sebesar 9,78% dengan jumlah populasi masyarakat miskin sebesar 26,42 juta jiwa.¹² Dari angka kemiskinan nasional tersebut, Jawa Tengah tergolong ke dalam salah satu dari 15 provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 11,41%.¹³ Dari angka kemiskinan tersebut, Kabupaten di eks Karesidenan Banyumas seperti di kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap memiliki angka kemiskinan dengan prosentase menempati urutan teratas di Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas dengan 13,26%; Kabupaten

¹¹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung

¹² "Badan Pusat Statistik," diakses 27 Maret 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

¹³ "Badan Pusat Statistik," diakses 27 Maret 2021, <https://boyolalikab.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/208/kemiskinan-provinsi-jawa-tengah-maret-2020.html>.

Purbalingga yakni sebesar 15,03%; Kabupaten Banjarnegara dengan prosentase 15,64% dan kabupaten Cilacap dengan angka 11,46%.¹⁴

Kemiskinan bukan semata-mata permasalahan pendapatan yang rendah. Data dari *UN Women* yang memprediksikan bahwa untuk tahun 2021, ada 47 juta perempuan yang berusia produktif antara 25-34 tahun akan jatuh dalam kemiskinan.¹⁵ Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi mengatakan bahwa dari sisi ekonomi, kesenjangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki sangat timpang.¹⁶ Kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi hak-hak dasarnya.¹⁷ Kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan kesehatan, pendidikan, dll. Kemiskinan terjadi akibat ketimpangan terhadap kepemilikan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi, dan sumber daya ekonomi lainnya. Kemiskinan terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan material dan non material yang dapat diwujudkan dalam kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan non material berkaitan dengan kebutuhan agama, kesehatan, keamanan, dan ketenteraman hidup. Ketimpangan juga terjadi karena adanya kesenjangan akses terhadap institusi-institusi sosial.

Sulikah Asmorowati menganalisis hubungan dan menentukan indikator kesejahteraan setiap perempuan, melalui indikator perkembangan gender dan kesejahteraan rumah tangga perempuan, menggunakan karakteristik rumah tangga untuk meningkatkan status kesejahteraan perempuan. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa indikator perempuan rentan dalam pendidikan, pasar tenaga kerja, dan bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga secara signifikan mempengaruhi

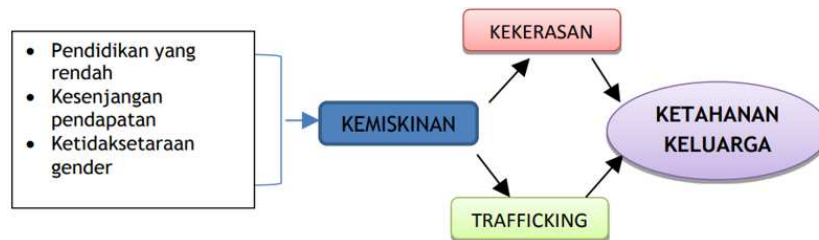
¹⁴ [BPS] Badan Pusat Statistik, 'Kemiskinan 2018-2020' <<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>> [accessed 29 September 2021].

¹⁵ Ferdi Rantung, 'Tahun Ini 47 Juta Perempuan Di Dunia Akan Jatuh Miskin Artikel Ini Telah Diterbitkan Di Halaman SINDOnews.Com Pada Senin, 04 Januari 2021 - 19:26 WIB Oleh Ferdi Rantung Dengan Judul "Tahun Ini 47 Juta Perempuan Di Dunia Akan Jatuh Miskin". Untuk Selengkap' <<https://ekbis.sindonews.com/read/289974/34/tahun-ini-47-juta-perempuan-di-dunia-akan-jatuh-miskin-1609761698>>.

¹⁶ Jaffry Prakoso, 'Ketimpangan Gender: Kemiskinan Perempuan Lebih Tinggi Hampir Di Semua Daerah Dari Sisi Ekonomi, Kesenjangan Kemiskinan Antara Perempuan Dan Laki-Laki Sangat Timpang. Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul "Ketimpangan Gender: Kemiskinan Perem', 2020 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297727/ketimpangan-gender-kemiskinan-perempuan-lebih-tinggi-hampir-di-semua-daerah>> [accessed 31 July 2022].

¹⁷ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 2000).

status kemiskinan perempuan di Indonesia. Hal ini mempengaruhi implikasi kebijakan dari upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah terkait isu gender yang terjadi di Indonesia.¹⁸



Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Strategi pemberdayaan perempuan memprioritaskan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) melalui penguatan Industri Rumahan dan wirausaha perempuan sehingga menjadi bagian upaya penanggulangan kemiskinan.¹⁹ Di Cina, kemiskinan perempuan lebih serius daripada laki-laki karena alasan struktural sosial dan ekonomi historis dan saat ini. Perempuan memiliki kerentanan mereka sendiri, dan pada saat yang sama, perempuan memainkan peran khusus dalam keluarga. Oleh karena itu, kemiskinan perempuan semakin menarik perhatian dari berbagai daerah. Perempuan miskin di Cina terutama terkonsentrasi di daerah pedesaan, yang memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang besar ketika mempelajari masalah kemiskinan perempuan pedesaan. Situasi kemiskinan perempuan pedesaan di China diselidiki melalui wawancara dan kuesioner. Akhirnya, Changhong Nie and Huangang Wang, dalam penelitian ‘*A Study on the Influencing Factors of Rural Women’s Poverty in Northeast China*’, mengemukakan saran yang efektif untuk kebijakan pengentasan kemiskinan nasional di China.²⁰ Bahkan pada tahun 2020, Tiongkok telah

¹⁸ Seli Sofiatun Nisak And Lilik Sugiharti, ‘Gender Inequality And Women Poverty In Indonesia’, *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 11.9 (2020), 375–87 <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerid=Hzoxme3b&scp=85082184496&origin=inward>>.

¹⁹ KPPPA, ‘Kajian Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumahan’, *Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, 2016, 1–44.

²⁰ Changhong Nie And Huangang Wang, ‘A Study On The Influencing Factors Of Rural Women’s Poverty In Northeast China’, *Asian Economic And Financial Review*, 10.12 (2020), 1410–29

memenangkan kemenangan komprehensif dalam pengentasan kemiskinan, setelah menyelesaikan tugas pengentasan kemiskinan terbesar dalam sejarah manusia dan memberikan solusi Tiongkok untuk pengentasan kemiskinan di seluruh dunia. Dari perspektif komunikasi pembangunan dan melalui pendekatan studi kasus, penelitian Xingping Zhu berfokus pada praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh perempuan kiri pedesaan China dengan bantuan teknologi Internet. Selanjutnya, Xingping merangkum tiga bentuk utama pengentasan kemiskinan perempuan, termasuk model *celebriti internet (content creator)* yang menggunakan media sosial untuk menjual produk lokal; model pemerintah yang memimpin dalam membangun platform pembelajaran, pelatihan, dan penjualan *online*; dan model yang menggabungkan panduan pemerintah, pemberdayaan perusahaan, dan promosi media. penelitian ini mengeksplorasi jalan menuju pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan perempuan Miskin Tiongkok di daerah pedesaan. Ini juga memberikan referensi untuk praktik masa depan kemiskinan perempuan dalam pengentasan kemiskinan perempuan bagi negara dan wilayah berkembang.²¹

Selain melakukan pembelajaran dan pelatihan bagi perempuan, Tujuan Untuk menyelidiki status keamanan psikologis dan kualitas hidup perempuan di daerah-daerah yang dilanda kemiskinan juga diperlukan, dan menganalisis keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Dengan metode pengambilan sampel yang nyaman, 368 perempuan dari keluarga miskin yang berpartisipasi dalam kursus pelatihan kejuruan pengentasan kemiskinan. Penelitian Zhen Li berkesimpulan Ada korelasi positif yang signifikan antara tingkat keamanan psikologis dan kualitas hidup wanita keluarga miskin. Meningkatkan kualitas hidup perempuan keluarga yang dilanda kemiskinan dapat meningkatkan keamanan psikologis mereka²²

<<https://doi.org/10.18488/Journal.Aefr.2020.1012.1410-1429>>.

²¹ Xingping Zhu and others, 'Technology Empowerment: A Path to Poverty Alleviation for Chinese Women from the Perspective of Development Communication', *Telecommunications Policy*, 46.6 (2022) <<https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102328>>.

²² Zhen Li and others, 'A Study on the Psychological Security and Quality of Life of the Women in Poverty-Stricken Family', *Chinese Journal of Practical Nursing*, 37.1 (2021), 49–55 <<https://doi.org/10.3760/cma.j.cn211501-20200107-00070>>.

Kemiskinan tidak hanya melanda China, sementara di Afrika juga berdampak terhadap anak-anak. Sehingga anak-anak yang kurang beruntung seringkali pula adalah anak-anak di pedesaan, mereka kekurangan gizi, putus sekolah, pengantin anak atau pekerja anak. Selain itu, mereka cenderung memiliki ibu buta huruf yang telah ditolak aksesnya ke sumber daya produktif. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada anak, Peringkat elastisitas menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan bukanlah efek pendidikan pada pengurangan kemiskinan anak atau efek kemiskinan anak pada pengurangan pendidikan, tetapi peningkatan status perempuan sebagai ibu dari mereka. Selain itu, kebijakan untuk solusi jangka panjang harus menyoroti kualitas kelembagaan sebagai prasyarat dalam penanggulangan kemiskinan anak dan memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses sumber daya produktif.²³

Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Perempuan di ex Karesidenan Banyumas

Dalam pemberdayaan perempuan, peran masyarakat menjadi penting, dan pemerintah juga terbuka dengan kerjasama dengan masyarakat. Salah satunya pembukaan 2000 BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas yang sudah dilakukan.²⁴ Kapasitas lembaga pelatihan nasional per 2019 sebanyak 275.000 orang dari 305 BLK Pemerintah. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2016 telah mencanangkan gerakan *Three Ends Plus* yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi, dan akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik. Dalam hal ini salah satu gerakan akhiri

²³ Rose Ingutia, Anthony N. Reztis, And John Sumelius, 'Child Poverty, Status Of Rural Women And Education In Sub Saharan Africa', *Children And Youth Services Review*, 111 (2020) <<https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2020.104869>>.

²⁴ Twitter @Infid_ID, https://twitter.com/Infid_ID/status/1176716833140822016, 25 September 2019, (Diakses 13 Juli 2023)

kesenjangan ekonomi dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.²⁵

Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kunci keberhasilan dari suatu program/kegiatan pemberdayaan adalah ketepatan dalam menyasar wilayah dan rumah tangga yang berhak, deskripsi pidato ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Prioritas dalam rangka Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Indonesia, 7 provinsi yang menjadi wilayah prioritas, dimana setiap provinsi tersebut dipilih 5 kabupaten sehingga total berjumlah 35 Kabupaten yang mewakili 20 persen atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa total jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Ketujuh provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya untuk tahun 2022, sejak awal diarahkan untuk 212 Kabupaten/Kota prioritas²⁶

Identifikasi dan Penajaman Sasaran Program atau Kegiatan Pemberdayaan (UMKM, Pelatihan, Vokasi, Padat Karya) berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), telah dialokasikan anggaran pada setiap bentuk program pemberdayaan, seperti program dalam rangka membantu UMKM, pelatihan dan vokasi, serta padat karya. Wapres RI Bapak Ma'ruf Amin menekankan bahwa anggaran bukan menjadi isu utama, namun keefektifan penyalurannya yang harus menjadi prioritas.

²⁵ Ir Herien Puspitawati And Others, '0D6F5-Laporan-Akhir-Ketahanan-Keluarga-2016', November, 2016.PI

²⁶ Wapres.go.id, 'Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan, Kunci Keberhasilan Suatu Program' <<https://www.wapresri.go.id/tepat-sasaran-dan-berkelanjutan-kunci-keberhasilan-suatu-program-pemberdayaan/>> [accessed 10 December 2023].

Dalam Pasal 1 point Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023, Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.²⁷ Dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang) dan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) di Convention Hall Banyumas, DPRD Provinsi Jateng menyoroti masih tingginya persoalan kemiskinan di wilayah eks karesidenan tersebut. Gubernur Jateng, Ganjar pranowo menyampaikan, “Kemiskinan di Bregasmalang dan Barlingmascakeb ini masih cukup tinggi, beberapa daerah masih di atas angka kemiskinan provinsi, ini yang harus menjadi perhatian. Datanya menyebutkan, kemiskinan di Kebumen mencapai 17,83%, sementara Banjarnegara 16,23%, dan Purbalingga 16,24%. Sementara untuk daerah Bregasmalang, kemiskinan di Brebes mencapai 17,43% diikuti Pemalang 16,56%.”²⁸

Program Pengentasan Kemiskinan di wilayah eks Karesiden Banyumas disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo sebenarnya telah dilakukan, namun serapan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut masih belum optimal. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian

²⁷ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023, Diakses 18 Juli 2023

²⁸ DPRD Jateng, Musrenbangwil Atasi Kemiskinan Di Bregasmalang Dan Barlingmascakeb, <https://dprd.jatengprov.go.id/musrenbangwil-atasi-kemiskinan-di-bregasmalang-dan-barlingmascakeb/>, 13 Juli 2023, (Diakses 13 Juli 2023)

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.²⁹ Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu isu global yang masuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkannya, komitmen dan kontribusi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi, dan masyarakat, sangat diperlukan.³⁰

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan berbagai pendekatan, salah satunya diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Menurut Kartasmita Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.³¹

Hal pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan dan urgensi kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti memberikan keleluasaan

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dikases 18 Juli 2023

³⁰ Twitter @IBCW, <https://Twitter.Com/IBCWE/Status/1679313372981121024>, Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Adalah Salah Satu Isu Global Yang Masuk Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Mewujudkannya, Komitmen Dan Kontribusi Seluruh Pihak, Mulai Dari Pemerintah, Sektor Swasta, Organisasi, Dan Masyarakat, Sangat Diperlukan (Diakses 13 Juli 2023)

³¹ Dr Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, 1st Edn (Bandung: Alfabeta, 2007), P. 1.

dan kewenangan kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran *community based resource management* (pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi *social learning* (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*).³²

Pemberdayaan yang sudah berjalan dari pemerintah daerah di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, meliputi dari Kabupaten Purbalingga salah satunya dengan adanya Subsidi bunga yang diberikan kepada lembaga keuangan dalam rangka meringankan beban bunga pinjaman di lembaga Keuangan. Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas Achmad Husein melalui Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono menyambut baik atas dilaksanakannya verifikasi lapangan yang nantinya akan diketahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan di Kabupaten Banyumas. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan kesetaraan gender. Dan menuangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah serta rencana strategis di berbagai OPD. Program program kesempatan kepada perempuan juga telah dilakukan seperti pemberian jabatan kepada para wanita, tentunya penempatan tersebut sesuai dengan kualifikasi masing masing.³³ Perempuan melalui

³² Lasiman Sugiri, 'Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This Article Highlights Role of It ' s the Local Government and His Staff In', 2015, 56–65 (p. 56).

³³ Supriyanto, 'Banyumas Berpeluang Terima Penghargaan APE Utama', *Rri*, 2021 <<https://rri.co.id/purwokerto/berita/banyumas/1003118/banyumas-berpeluang-terima-penghargaan-ape-utama>>.

Ekonomi digital, sebagai pelaku usaha, kaum perempuan juga mampu dan bisa memaksimalkan kemampuannya melalui digital ekonomi yang akan menghasilkan kemitraan dalam jenjang usaha sehingga kaum perempuan menjadi mandiri tanpa harus selalu bergantung pada kaum laki-laki.³⁴ Dalam pembahasan ini, terdapat hadist yang dapat menjadi rujukan dalam kemampuan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan dalam berusaha dan mandiri secara ekonomi;

عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد في حاجة أخيه

Dari Zaid bin Tsabit dari Rasulullah SAW bersabda: *"Allah senantiasa memenuhi kebutuhan hamba selama hamba memenuhi kebutuhan saudaranya"* (HR. At-Thabrani, Mu'jam Al-Kabir, No.4667)

Hadis diatas menggambarkan bahwa setiap yang bekerja keras pasti Allah akan memenuhi kebutuhannya, tanpa melihat jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika dia membantu kepada seseorang, maka Allah akan membantunya juga, jika seorang perempuan dapat berdaya, berarti dia bisa membebaskan dirinya dari beban kaum laki-laki. Hal ini mencerminkan kemuliaan hati dan semangat kepedulian sosial dalam Islam. Hadits ini mengandung pesan yang mendalam tentang hubungan timbal balik antar sesama muslim, dan bagaimana Allah SWT akan selalu mencukupkan kebutuhan hamba-Nya yang senantiasa berusaha membantu saudaranya. Perlu dipahami bahwa makna "memenuhi kebutuhan" dalam hadits ini bukan hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup bantuan non-materi seperti dukungan moral, semangat, dan pengorbanan. Ketika seorang muslim dengan tulus ikhlas membantu saudaranya yang sedang kesulitan, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan dan pertolongan dalam hidupnya. Hadits ini juga mengandung pesan tentang pentingnya pemberdayaan perempuan. Ketika seorang perempuan mampu mandiri dan berdaya, dia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga dapat membantu orang lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkarya dan berkontribusi dalam masyarakat.

³⁴ Sarah Mulyawati, 'PEREMPUAN DAN EKONOMI DIGITAL', *DPRD Cilacap*, 2022 <<https://dprd.cilacapkab.go.id/perempuan-dan-ekonomi-digital/>> [accessed 14 October 2023].

Gerakan Ekonomi Produktif, Penggerak Ekonomi Keluarga

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap daya tahan keluarga termasuk ekonomi didalamnya. Mengatasi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko PMK Marwan Syaukani mengatakan "Oleh karena itu, perlu strategi penguatan ekonomi terutama bagi keluarga miskin," ujarnya Ia menyebutkan beberapa strategi tersebut diantaranya ialah dengan mengubah mindset, memberikan pendampingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, edukasi berkelanjutan, pengembangan produk, dan pelayanan pemasaran yang baik. Di samping itu, strategi penguatan ekonomi keluarga juga dilakukan kepada para calon pengantin. Hal itu sebagai upaya mengurangi kemiskinan laten untuk membentuk keluarga kuat, kampung kuat, bahkan hingga negara yang kuat. *"Kemiskinan laten yang cukup tinggi itu bisa menjadikan generasi dari keluarga miskin terancam menjadi keluarga yang juga miskin di masa mendatang,"* tukas Marwan.³⁵

Tiga permasalahan aktual yang dihadapi oleh UMKM perempuan, di antaranya konstruksi sosial patriarki, infrastruktur, akses dan kemampuan perempuan mengakses teknologi dan rendahnya literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan. Pemerintah Meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan, bertujuan meningkatkan akses layanan keuangan formal kepada Perempuan. Program ini meliputi pelatihan kepemimpinan Kewirausahaan, Literasi dan inklusi keuangan Perempuan, serta pemanfaatan literasi digital untuk bisnis.³⁶ Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, ketrampilan serta kinerja keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini diharapkan keluarga-keluarga yang masih tergolong Pra Sejahtera dan sejahtera alasan ekonomi mampu berusaha dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pendapatan keluarga. Kegiatan pokok pemberdayaan ekonomi keluarga yang

³⁵ Puput Mutiara, 'Pemerintah Bahas Kebijakan Penguatan Ekonomi Keluarga' <<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-bahas-kebijakan-penguatan-ekonomi-keluarga>> [accessed 10 August 2022].

³⁶ AntaraNews, 'Menteri PPPA Terbatasnya Akses Teknologi Hambat Ukm Perempuan', 6 Juli 2022, 2022, p. diakses 18 Juli 2023 <<https://www.antaranews.com/berita/2981773/menteri-pppa-terbatasnya-akses-teknologi-hambat-umkm-perempuan>>.

dilakukan melalui kelompok kegiatan ekonomi produktif, dalam hal ini Kelompok UPPKS menekankan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas dan dapat meningkatkan akses pada berbagai sumber daya yang dibutuhkan keluarga agar dapat meningkatkan kualitas usahanya, antara lain dalam pengembangan modal produksi pemasaran dan peningkatan ketrampilan.

Program Pemberdayaan Keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat berwirausaha serta meningkatkan ketrampilan di bidang ekonomi produktif. Program pemberdayaan keluarga adalah salah satu sasaran Program KB Nasional melalui kelompok-kelompok UPPKS terutama bagi keluarga Pra sejahtera dalam upaya meningkatkan pendapatan menuju kepada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ini menekankan pada aspek kualitas produksi, variasi produk serta jangkauan pemasaran. Melalui kelompok yang akan terbentuk ini diharapkan keluarga mampu meningkatkan akses yang ada dan tersedia.

Tidak dapat dipungkiri, memasuki era globalisasi kita dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Bukan hanya dalam aspek pengetahuan, teknologi dan industri, melainkan juga dalam aspek ekonomi. Semakin ketatnya persaingan telah menyadarkan kita betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal. Kita ketahui bersama bahwa dalam mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk, kita menerapkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan pembangunan pemberdayaan keluarga. Dengan konsep pembangunan ini, penduduk dilihat secara utuh yaitu sebagai diri pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga Negara dan sebagai himpunan kuantitas.

Sementara keluarga dipandang sebagai wahana strategis dalam pengembangan sumber daya manusia potensial yang melahirkan manusia-manusia pembangunan yang handal di segala bidang. Logikanya, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM secara umum, mengingat keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi setiap individu. Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi suatu cerminan keberdayaan

ekonomi masyarakat maupun bangsa. Keluarga dengan kemampuan ekonomi yang kuat, akan member dukungan yang kuat pula terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dan bangsa.

Pembangunan aspek ekonomi dalam keluarga menjadi suatu yang sangat penting diupayakan agar keluarga dapat membangun dirinya menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan terkait dengan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka membangun keluarga yang mandiri dan sejahtera, adalah pertama, keluarga sasaran harus dikondisikan dalam suasana kondusif untuk mampu berusaha dari sisi mental dan spiritual. Artinya jiwa berwira usaha harus dibangun dan dimantapkan lebih dahulu, agar setiap anggota keluarga memiliki sikap mental yang memadai sebagai seorang wirausahaan yang mandiri. Untuk upaya yang pertama ini, pembinaan pada keluarga melalui KIE dan konseling yang efektif menjadi kunci keberhasilan untuk membawa keluarga-keluarga sasaran menjadi keluarga yang siap untuk memberdayakan diri dalam aspek ekonomi. Kedua, keluarga yang secara mental dan spiritual siap untuk berwirausaha, dididik ketrampilan dan kemampuan berwirausaha sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini mengingat, tidak semua keluarga memiliki dan potensi yang sama dalam berusaha. Langkah selanjutnya adalah pemberian pinjaman modal usaha sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksinya. Dalam hal ini bisa menggandeng lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada di tingkat kecamatan. Dalam hadist dibawah ini menguatkan bahwa pondasi nilai material itu penting;

عن عائشة رضي الله عنها قالت لمانزلت آخر البقرة فرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حرم التجارة في الخمر

Dari 'Aisyah RA berkata: "ketika turun ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Nabi SAW menerima ayat-ayat tersebut ketika sedang berada di masjid maka kemudian beliau mengharamkan jual beli didalam masjid (HR. Bukhari, No.1942, Kitab Jual beli, Bab:pemakan Riba)

Hadis diatas menunjukkan bahwa nilai syar'i merupakan pondasi nilai material. Ketika suatu anggota keluarga berwirausaha, harus memperhatikan dari kehalalan barang dan cara memperolehnya juga dengan baik pula. Hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah RA tersebut memang menunjukkan hubungan erat antara nilai syar'i dan nilai

material. Rasulullah SAW dengan tegas melarang jual beli di dalam masjid, meskipun ayat tersebut turun di tengah masjid. Hal ini menunjukkan bahwa kesucian dan kemuliaan masjid harus dijaga dari aktivitas yang bersifat duniawi, termasuk jual beli.

Lebih dalam lagi, hadits ini juga mengandung pesan moral bahwa nilai syar'i, harus menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk berwirausaha. Seorang wirausahawan Muslim tidak hanya dituntut untuk meraih keuntungan materi, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan dalam memperoleh harta dan cara mengelolanya.

Berikut beberapa poin penting yang dapat dipelajari dari hadits tersebut terkait nilai syar'i dan nilai material dalam berwirausaha; a) Kehalalan Harta. Seorang wirausahawan Muslim wajib memastikan bahwa semua barang yang diperdagangkan dan proses mendapatkannya halal dan terhindar dari riba, penipuan, dan kecurangan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. b) Keberkahan Usaha. Dengan menjalankan wirausaha berdasarkan nilai syar'i, seorang Muslim diyakini akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan ini tidak hanya dalam bentuk keuntungan materi, tetapi juga ketenangan hati, kebahagiaan hidup, dan kemuliaan di sisi Allah. c) Tanggung Jawab Sosial. Wirausahawan Muslim tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan lapangan pekerjaan, membantu UMKM lokal, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial lainnya.

Dengan memahami hubungan antara nilai syar'i dan nilai material dalam berwirausaha, seorang Muslim dapat menjalankan usahanya dengan penuh keberkahan dan memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan agama. Sebagai tambahan, hadits ini juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara mengejar kesuksesan duniawi dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Ingatlah bahwa harta yang halal dan berkah merupakan kunci kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.

Sebagai fokus penelitian, gerakan ekonomi Produktif yang berada di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut; Kelompok Usaha Bersama Berkah Jaya Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Salah satu keterbatasan yang dimiliki

oleh kelompok usaha adalah kemampuan untuk memiliki modal usaha kerja. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan, papan, sandang termasuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk mendapat modal usaha perlu dibentuk usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompok dan potensi yang ada di daerah. Usaha kelompok yang dibentuk juga memperhatikan jenis usaha, hasil produksi dan pemasaran hasil usaha agar dapat menghasilkan dengan baik dan berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin telah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berkah Jaya dengan jenis usaha Rajut Benang. KUB Berkah Jaya belum memiliki *showroom display* produk dan penyimpanan hasil produksi rajut dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kelompok usaha bersama industri kecil merajut benang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kontribusi sosial ekonomi yang baik terhadap pembangunan masyarakat pada akhirnya. KUB Berkah Jaya memiliki visi Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Usaha Ekonomis Produktif dalam bentuk kelompok. Dengan misi KUB berkah Jaya sbb;

- a. Meningkatkan motivasi dan kerjasama diantara anggota KUB dalam mengelola modal usaha ekonomis produktif secara kelompok.
- b. Meningkatkan pendapatan anggota KUB sehingga mampu mengatasi masalah-masalah dalam keluarga terutama dalam pemenuhan kebutuhan secara layak.

Lokasi kegiatan KUB Berkah Jaya Desa Tidu RT 01 RW 01 dilaksanakan di Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. KUB Berkah Jaya telah melaksanakan usaha ekonomis produktif dalam bentuk kelompok sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan KEMENKUM HAM NOMOR: AHU-0072965.AH.01. 07. TAHUN 2016. Susunan Pengurus KUB Anggota KUB Berkah Jaya sebanyak 115 orang KUB Berkah Jaya dengan jenis usaha Rajut benang.

Gerakan Ekonomi produktif di daerah Kabupaten Banyumas salah satunya yaitu Gerakan Pengelolaan sampah melalui *bank sampah Inyong* yang dikelola oleh Ibu Nur Haryatni. Lokasi kegiatan Bank Sampah Inyong di Kutasari RT 01 RW 01 Kelurahan Kutasari, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Bank Sampah Inyong telah melaksanakan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui kegiatan usaha nabung sampah dan Infak Sampah.

Sesuai dengan NIB 9120200642756. Kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh Ibu Nur Haryatni bertujuan untuk mengelola sampah agar lebih tertatanya penanganan pengelolaan sampah di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Dengan melakukan tempat sampah terpilah, menggunakan mesin pencacah sampah, penjemputan sampah, mengelola sampah menjadi pupuk kompos, dan juga sarana edukasi pengelolaan sampah menjadi budidaya maggot. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan jenis sampah yang akan diletakkan di tempat sampah terpilah baik itu sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya beracun, maupun sampah lainnya. Hasil wawancara dengan Nurhayatni yang juga merupakan ketua dari KWT (Kelompok Wanita Tani) Makmur Berkah Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa perempuan berdaya itu apabila memiliki *income* dan pendapatan sendiri, mengelola sampah pada lingkungan rumah kita sendiri dan menghasilkan uang dari sampah kita sendiri, bisa berguna untuk lingkungan dan masyarakat. Anggota KWT Makmur Berkah tidak meminjam modal Usaha kepada perbankan dikarenakan dengan pengelolaan sampah rumah tangga mereka saja sudah mendapatkan pendapatan untuk keluarga, Apabila anggota KWT Makmur Berkah membutuhkan uang untuk biaya pendidikan dan keluarganya maka bisa dengan menukar sampah ke warung milik Pengelola Bank Sampah di desa tersebut yaitu Ibu Nurhayatni.

Anggota KWT tersebut tidak bergantung kepada Lembaga Institusi formal Perbankan. Sampai saat ini pun, bantuan dari pemerintah desa berupa lahan untuk pengembangan KWT Makmur Berkah dan juga lokasi untuk Penimbunan Sampah di dekat gazebo KWT Makmur Berkah. Hubungan dengan perbankan hanya untuk

pembiayaan yang besar untuk investasi atau kebutuhan yang lebih besar. Namun untuk kebutuhan yang kecil para anggota datang ke Ibu Nurhayatni untuk mendapatkan pembiayaan yang dikelola oleh Bank Sampah Inyong desa Kutasari Kecamatan baturraden Kabupaten Banyumas.³⁷ Bahkan Menurut PPL Kecamatan Baturraden, mereka hanya sebagai pelaksana program dari pemerintah saja,³⁸ sementara *asset based communities development* perlu ditekankan dalam riset sebagai inisiasi program kerja yang akan dijalankan.

Program pemerintah tidak lagi bersifat *Top-down*, namun saat ini pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seharusnya *bottom up* sehingga serapan dana yang seharusnya tepat sasaran akan dapat optimal digunakan oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan analisa asset yang mereka miliki, dan potensi dari desa tersebut. Penting pula menjadi perhatian pemerintah bahwa program pemberdayaan perempuan tidak hanya terjadi pada saat *euphoria* konstelasi politik yang terjadi di tanah air, maka program berjalan dengan baik dan lancar, namun program ini, menggunakan *asset based communities development* yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Kritik yang dilontarkan, banyak program pemberdayaan perempuan berjalan pada saat pencalonan wakil-wakil daerah.³⁹ Program berdatangan menawarkan bantuan modal usaha di kelompok Usaha Bersama milik perempuan-perempuan desa, namun setelah hal tersebut berjalan satu periode program ini tidak ada monitoring dan evaluasi pembinaan terhadap KUB penerima dana bantuan modal usaha. Pada saat Program Modal usaha tersebut selesai maka program pemberdayaan tersebut juga selesai. Program pemberdayaan seharusnya tidak menjadi ajang politisasi oleh sekelompok oknum kader yang akan menjabat namun sebagai empati terhadap kehidupan masyarakat yang ter-*marginal*-kan oleh akses sumber daya yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitator program pemberdayaan tersebut.

³⁷ Wawancara dengan Ketua KWT Makmur Berkah Ibu Nurhayatni Desa Kutasari kecamatan Baturraden pada tanggal 18 Juli 2023

³⁸ Wawancara dengan Ibu Winda dan Endarko PPL Kecamatan Baturraden Kabupaten banyumas pada tanggal 29 juli 2023.

³⁹ Wawancara dengan Umiyati, Ketua KUB Berkah Jaya Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga pada Tanggal 24 April 2022.

KESIMPULAN

Kegiatan Pemberdayaan yang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan juga dana alokasi yang sudah banyak dikucurkan melalui program pemerintahan desa maupun organisasi-organisasi masyarakat nampaknya belum semua dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan Program Pengentasan Kemiskinan di wilayah eks Karesiden Banyumas dari data yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo sebenarnya telah dilakukan, namun serapan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut masih belum optimal. Serapan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat nyatanya belum digunakan secara maksimal oleh sebagian besar daerah. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan aparatur setempat dalam menyusun rancangan anggaran, kurang menggali Asset Based Communities dari desa tersebut sehingga sasaran dana yang seharusnya dapat dipergunakan dengan maksimal realitasnya sangat lambat. Dengan Adanya pemberdayaan perempuan melalui ekonomi produktif seharusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah khususnya pemerintah daerah, karena berdasarkan wawancara dan pengamatan penelitian, ekonomi produktif melalui kelompok di desa desa lebih dirasakan kebermanfaatannya untuk keluarga, para anggota dapat memperoleh dan mencukupi kebutuhan hidup mereka secara cepat dengan adanya pengelolaan dana yang ada di kelompok kelompok mereka seperti KUB berkah jaya dan juga Bank Sampah Inyong.

Peran pemerintah dalam program pemberdayaan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga di eks karesiden banyumas masih banyak yg perlu dilakukan, riset ini menjadi tanggung jawab bersama antara akademisi, pemerintah daerah, pemerhati masyarakat dan organisasi nirlaba untuk pemberdaya masyarakat desa. Penelitian ini masih sebatas deskripsi dari fenomena sosial yang terjadi di eks karesidenan banyumas, hal ini belum menyentuh tentang Regulasi daerah yang ramah terhadap perempuan dan bagaimana regulasi mampu menjadi simultan bagi produktifitas masyarakat khususnya perempuan. Sistem bekerjanya hukum dalam lingkungan sosial masyarakat masih belum tertuang dalam tulisan ini, terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk membedah

regulasi dan perundang-undangan positif sehingga tidak menjadi implikasi negatif dalam pelaksanaannya, Pemberdayaan perempuan yang mengalami banalitas dan terus dipolitisasi tidak akan terjadi lagi. Harapan masyarakat terkait hal ini dapat pula pemerintah menggerakkan industry-industri besar untuk menyerahkan dana-dana CSR (*cash social responsibility*) untuk program pemberdayaan perempuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik, 'Kemiskinan 2018-2020' <<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>> [accessed 29 September 2021]
- AntaraNews, 'Menteri PPPA Terbatasnya Akses Teknologi Hambat Umkm Perempuan', 6 Juli 2022, 2022 <<https://www.antaranews.com/berita/2981773/menteri-pppa-terbatasnya-akses-teknologi-hambat-umkm-perempuan>>
- Anwar, Dr, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, 1st edn (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Asmorowati, Sulikah, Violeta Schubert, and Dian Yulie Reindrawati, 'Feminization of Poverty Program (PFK) and the Empowerment of Women Heads-of-Household in East Java, Indonesia', *Journal of International Women's Studies*, 20.9 (2019), 43–53 <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85077620594&origin=inward>>
- 'Black's Law Dictionary - Google Books', 2021 <https://www.google.co.id/books/edition/Black_s_Law_Dictionary/weU2AQAAIAAJ?hl=id>
- Danaryati, Andin (Litbang MPI), 'Perbandingan Laki Laki Dan Perempuan Di Dunia', *Pskji.Org* (Jakarta) <<https://pskji.org/18029/perbandingan-laki-laki-dan-perempuan-di-dunia/>>
- Hendriks, Sarah, 'The Role of Financial Inclusion in Driving Women's Economic Empowerment', *Development in Practice*, 29.8 (2019), 1029–38 <<https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1660308>>
- Ibrahima, Aissetu Barry, 'Asset Based Community Development (ABCD)', *Transforming Society*, 2018, 229–40 <<https://doi.org/10.4324/9781315205755-17>>
- Ingutia, Rose, Anthony N. Rezitis, and John Sumelius, 'Child Poverty, Status of Rural Women and Education in Sub Saharan Africa', *Children and Youth Services Review*, 111 (2020) <<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104869>>
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan, Kunci Keberhasilan Suatu Program Pemberdayaan', 2021 <https://setneg.go.id/baca/index/tepat_sasaran_dan_berkelanjutan_kunci_keberhasilan-suatu_program_pemberdayaan>
- KPPPA, 'Kajian Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumah', *Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, 2016, 1–44
- Li, Zhen, Yinghui Chen, Miao Gao, and Lu Zhang, 'A Study on the Psychological Security and Quality of Life of the Women in Poverty-Stricken Family', *Chinese Journal of Practical Nursing*, 37.1 (2021), 49–55 <<https://doi.org/10.3760/cma.j.cn211501-20200107-00070>>

- Mei, Anna, '7 Alasan Kenapa Women Empowerment Itu Krusial Banget Dalam Hidup', *IDN Time* <<https://www.idntimes.com/life/women/anna-mei/alasan-kenapa-women-empowerment-itu-krusial-banget-c1c2#:~:text=Women empowerment adalah salah satu, penuh dengan konfrontasi gender bias.>>
- 'Mengenal Self Worth Dan Cara Meningkatkanannya', 15 April 2022 (Medan, April 2022), p. Lubis, Tamara <<https://suarausu.or.id/mengenal-self-worth-dan-cara-meningkatkannya/#:~:text=Self-worth adalah keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya, ataupun melakukan suatu hal tertentu untuk merasa berharga.>>
- Mulyawati, Sarah, 'Perempuan Dan Ekonomi Digital', *DPRD Cilacap*, 2022 <<https://dprd.cilacapkab.go.id/perempuan-dan-ekonomi-digital/>> [accessed 14 October 2023]
- Muslim, Azis, 'Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur)', *Jurnal Penyuluhan*, 13.1 (2017), 79 <<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.14524>>
- Mutiara, Puput, 'Pemerintah Bahas Kebijakan Penguatan Ekonomi Keluarga' <<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-bahas-kebijakan-penguatan-ekonomi-keluarga>> [accessed 10 August 2022]
- Nie, Changhong, and Huangang Wang, 'A Study on the Influencing Factors of Rural Women's Poverty in Northeast China', *Asian Economic and Financial Review*, 10.12 (2020), 1410–29 <<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1012.1410-1429>>
- Nisak, Seli Sofiatun, and Lilik Sugiharti, 'Gender Inequality and Women Poverty in Indonesia', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.9 (2020), 375–87 <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85082184496&origin=inward>>
- Nugroho, Heru, 'Disparitas Gender Dan Pembangunan Ekonomi', *Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil/Sumbar/* <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2949-disparitas-gender-dan-pembangunan-ekonomi.html>> [accessed 17 September 2022]
- Nurhadi, Nurhadi, 'SENI MENGELOLA KEUANGAN KELUARGA' <<https://home.kemenaglamsel.com/berita/detail/seni-mengelola-keuangan-keluarga>> [accessed 10 August 2022]
- OJK, 'Perencanaan Keuangan Keluarga', *Perencanaan Keuangan Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, 2017, 1–42 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/25_Buku_Perencanaan_Keluangan.pdf>
- Parwez, Sazzad, and Ruchi Patel, 'Augmenting Women Empowerment: A Systematic Literature Review on Microfinance-Led Developmental Interventions', *Journal of Global Responsibility*, 2022, 338–60 <<https://doi.org/10.1108/JGR-01-2021-0005>>
- 'Perbup_No_15_Tahun_2020.Pdf'
- Prakoso, Jaffry, 'Ketimpangan Gender: Kemiskinan Perempuan Lebih Tinggi Hampir Di Semua Daerah Dari Sisi Ekonomi, Kesenjangan Kemiskinan Antara Perempuan Dan Laki-Laki Sangat Timpang. Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul "Ketimpangan Gender: Kemiskinan Perempuan"', 2020 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297727/ketimpangan-gender-kemiskinan-perempuan-lebih-tinggi-hampir-di-semua-daerah>> [accessed 31 July 2022]
- Puspitawati, Ir Herien, M Sc, M Sc, Tin Herawati, M Si, Atika Rahma, and others, '0D6F5-Laporan-Akhir-Ketahanan-Keluarga-2016', November, 2016

- Rantung, Ferdi, 'Tahun Ini 47 Juta Perempuan Di Dunia Akan Jatuh Miskin Artikel Ini Telah Diterbitkan Di Halaman SINDOnews.Com Pada Senin, 04 Januari 2021 - 19:26 WIB Oleh Ferdi Rantung Dengan Judul "Tahun Ini 47 Juta Perempuan Di Dunia Akan Jatuh Miskin". Untuk Selengkap' <<https://ekbis.sindonews.com/read/289974/34/tahun-ini-47-juta-perempuan-di-dunia-akan-jatuh-miskin-1609761698>>
- Sanrego, Yulizar, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan) Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*, ed. by Qisthi Press, Cetakan 1 (Jakarta: Qisthi Press, 2016), I
- Sarno, sarno, 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Pagak Banjarnegara Melalui Transfer Teknologi Hidroponik Sayuran Organik', *Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.24269/adi.v2i1.900>>
- Sejati, Hono, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016), III <<https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1345>>
- Sugiri, Lasiman, 'Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This Article Highlights Role of It ' s the Local Government and His Staff In', 2015, 56–65
- Supriyanto, 'Banyumas Berpeluang Terima Penghargaan APE Utama', *Rri*, 2021 <<https://rri.co.id/purwokerto/berita/banyumas/1003118/banyumas-berpeluang-terima-penghargaan-ape-utama>>
- Tinker, Irene, 'Beyond Economics: Sheltering the Whole Woman', *EnGENDERing Wealth and Well-Being: Empowerment for Global Change*, 2018, pp. 261–83 <<https://doi.org/10.4324/9780429500800>>
- Wapres.go.id, 'Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan, Kunci Keberhasilan Suatu Program' <<https://www.wapresri.go.id/tepat-sasaran-dan-berkelanjutan-kunci-keberhasilan-suatu-program-pemberdayaan/>> [accessed 10 December 2023]
- Zhu, Xingping, Xiaoyu Li, Jiankun Gong, and Jinghong Xu, 'Technology Empowerment: A Path to Poverty Alleviation for Chinese Women from the Perspective of Development Communication', *Telecommunications Policy*, 46.6 (2022) <<https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102328>>